

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi publik semakin berkembang pesat karena adanya reformasi dalam kebijakan pemerintah otonom daerah dan desentralisasi fiskal yang menekankan peran pemerintah daerah. Munculnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya Undang-Undang ini mengalami revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Melalui Undang-Undang ini pemerintah menetapkan sistem desentralisasi sebagai pengganti sentralisasi otoritas yang dianggap tidak lagi relevan dalam menciptakan stabilitas nasional.

Saat ini, banyak lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan organisasi publik menggunakan akuntansi sektor publik. Pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak besar bagi nasib suatu daerah karena dapat memperkuat daerah tersebut dan meningkatkan kinerja dalam mengelola keuangan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan efektif, transparan, akuntabel, dan adil. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menggambarkan pembiayaan pemerintah terhadap kegiatan pelaksanaan dan pembangunan.

Menurut Sitepu, et al (2023 : 7-10) Akuntansi sektor publik adalah salah satu cabang dari ilmu akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan organisasi sektor publik, baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, baik yang berupa instansi, Kementerian, Badan, organisasi nirlaba, dan lain-lain. Kepentingan Akuntansi Sektor Publik ini terlihat dalam berbagai tugas yang harus dijalankannya, yang meliputi:

1. Menyediakan informasi keuangan yang akurat

Laporan keuangan organisasi sektor publik yang dihasilkan melalui penggunaan Akuntansi Sektor Publik sangat penting karena akan digunakan oleh masyarakat umum dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti para investor, kreditor, lembaga

pemeringkat dan pemantau, serta negara dan Lembaga lembaga dunia lainnya. Oleh karenanya laporan keuangan organisasi sektor publik harus akurat, relevan dan dapat dipercaya.

2. Meningkatkan transparansi pemerintah

Melalui penerapan dan penggunaan Akuntansi Sektor Publik yang baik dan konsisten, maka pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat lebih transparan karena laporan keuangan yang dihasilkannya pun dapat diakses dan dipahami secara luas oleh masyarakat sehingga dapat menciptakan dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap penggunaan dana publik oleh pemerintah, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan negara/daerah.

3. Mengukur Kinerja Pemerintah

Akuntansi Sektor Publik juga dapat membantu pemerintah untuk mengukur kinerja mereka dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara/daerah. Berbagai hal yang telah dianggarkan dapat dievaluasi lebih lanjut, termasuk program-program yang telah diimplementasikan, agar dapat mengidentifikasi berbagai area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut ke depannya, sehingga efisiensi dan efektifitas penggunaan dana publik dapat tercapai.

Peran akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Akuntansi Sektor Publik berfungsi untuk membuat keputusan, terutama untuk memberikan bantuan kepada manajer dalam melakukan penentuan penggunaan sumber daya. Informasi keuangan dapat digunakan untuk menentukan harga sebuah program, proyek, atau kegiatan dan memenuhi syarat dengan baik baik secara ekonomi maupun teknis. Dengan Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menetapkan biaya layanan (*cost of service*) layanan-layanan yang diberikan kepada masyarakat, menetapkan tarif yang sudah ditentukan, dan harga yang akan dikenakan kepada

masyarakat. Selain itu, dapat dipergunakan untuk membantu dalam memilih program efisien dan hemat biaya serta untuk evaluasi investasi.

2.1.2 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana tertulis tentang kegiatan suatu entitas yang disusun secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam satuan moneter, namun dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Penganggaran publik adalah proses pengaturan penggunaan dana untuk setiap program atau kegiatan dalam bentuk uang dari sumber dana publik. Anggaran publik digunakan sebagai alat perencanaan dan kontrol. Sebagai alat perencanaan, anggaran menunjukkan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat, sementara sebagai alat kontrol, anggaran menunjukkan alokasi dana publik yang disetujui oleh pihak legislatif untuk pengeluaran. Melalui data pengeluaran yang tercatat dalam anggaran belanja instansi pemerintah, dapat dipantau apakah anggaran yang digunakan dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan publik.

Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga, rencana kerja dan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara, dan rencana kerja dan anggaran bendahara umum negara. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari masing-masing kementerian negara/lembaga, yang disusun menurut bagian anggaran kementerian negara/lembaga. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA-BUN adalah dokumen rencana keuangan tahunan dari bendahara umum negara yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara, yang disusun menurut bagian anggaran bendahara umum negara.

Pendekatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) mencakup:

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) harus menggunakan pendekatan:
 - a. Kerangka pengeluaran jangka menengah.
 - b. Penganggaran terpadu.
 - c. Penganggaran berbasis Kinerja.

2. Rencana Kerja Anggaran (RKA) disusun secara sistematis dan dirinci menurut klasifikasi anggaran.
3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) menggunakan instrumen:
 - a. Indikator Kinerja.
 - b. Standar Biaya.
 - c. Evaluasi Kinerja.

Dalam akuntansi, anggaran memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi utama anggaran adalah sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Sebagai alat perencanaan, anggaran memberikan target yang harus dicapai oleh pemerintah dalam satu periode. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan batasan-batasan tertentu dalam melakukan pengeluaran daerah. Anggaran juga dapat digunakan sebagai dasar dalam mengukur kinerja pemerintah daerah.

Tujuan Anggaran bagi organisasi:

1. Memaksa manajer untuk membuat rencana.
2. Memberikan informasi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
3. Sebagai standar bagi evaluasi kinerja.
4. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi.

Anggaran mempunyai banyak manfaat, antara lain :

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.
2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.
3. Memotivasi pegawai.
4. Menimbulkan rasa tanggungjawab pada pegawai.
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
6. Sumber daya, seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
7. Alat pendidikan bagi para manajer

2.1.3 Pengertian Belanja

Menurut Prasetyo & Nugraheni (2020 : 32) Belanja merupakan semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh bendaharawan umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran untuk suatu periode yang lebih besar dari periode pelaporan yang tidak akan diperoleh penggantian dari bendahara umum daerah dan bendahara umum negara. Belanja daerah adalah belanja pemerintah yang berupa

belanja langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan program-program public. Beban tersebut terdiri dari beban pegawai, beban peralatan, dan beban lainlain. untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan.

Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, klasifikasi jenis belanja adalah pengelompokan belanja negara berdasarkan jenis belanja dan transfer ke daerah :

1. Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
2. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
3. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/ atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi 12 (dua belas) bulan serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.
4. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat.

Belanja pemerintah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial.

Belanja pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menjaga harga, tingkat *output*, dan kesempatan kerja agar tetap stabil serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan penyediaan layanan publik oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat, diperlukan anggaran yang lebih besar. Semakin besar kegiatan pemerintah, semakin besar pula belanja pemerintah yang diperlukan.

2.1.4 Efektivitas

Efektivitas adalah keterkaitan antara hasil dan tujuan yang perlu dicapai. Istilah efektif berasal dari Bahasa Inggris, yang berarti berhasil atau tepat. Secara umum, efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu tujuan atau target berhasil dicapai sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Sebuah organisasi dianggap baik jika mampu mencapai atau menyelesaikan sesuatu yang sudah direncanakan, atau sebaliknya. Menurut Mesiono (2018 : 45) Efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan/kesuksesan dalam melakukan tugas-tugas sesuai dengan perencanaannya, baik dilakukan atas nama perorangan, organisasi maupun lembaga / instansi, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh tenaga profesional, berpengalaman dan memiliki pengetahuan serta dana yang memadai. Semakin besar kontribusi output pada pencapaian tujuan, berarti semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas tidak menyatakan besarnya biaya yang sudah dikeluarkan, akan tetapi lebih melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau belum. Tingkat rasio efektivitas anggaran belanja diukur membagi realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} = 100\%$$

Tabel 2.1
Rasio Efektivitas

Rasio Efektifitas	Kriteria
>100	Sangat Efektiv
90% - 100%	Efektiv
80% - 90%	Cukup Efektiv

60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Efektivitas penting karena ia mempengaruhi berbagai aspek kehidupan pribadi dan profesional. Berdasarkan Melnyk, et al (2020 : 1-21) menekankan bahwa pengukuran kinerja adalah kunci untuk mencapai efektivitas dalam manajemen. Pengukuran kinerja yang efektif memungkinkan organisasi untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan proses serta hasil operasional. Mereka menunjukkan bahwa tanpa pengukuran yang tepat, sulit untuk menilai seberapa efektif strategi dan tindakan manajerial dalam mencapai tujuan organisasi.

Berikut beberapa alasan mengapa efektivitas sangat penting:

1. Pencapaian Tujuan : Efektivitas memastikan bahwa kita dapat mencapai tujuan dengan cara yang paling optimal. Ini membantu kita fokus pada hasil yang diinginkan dan menghindari usaha yang sia-sia.
2. Penggunaan Sumber Daya : Dengan bekerja secara efektif, kita dapat memanfaatkan sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga secara maksimal. Ini menghindari pemborosan dan meningkatkan efisiensi.
3. Produktivitas yang Lebih Tinggi : Efektivitas membantu kita menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan lebih baik. Ini meningkatkan produktivitas dan memungkinkan kita untuk melakukan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat.
4. Kualitas Hasil : Menggunakan pendekatan yang efektif sering kali menghasilkan hasil yang lebih berkualitas. Ini penting dalam konteks pekerjaan, proyek, atau dalam kehidupan sehari-hari.
5. Kepuasan dan Motivasi : Ketika kita melihat hasil yang baik dari usaha yang dilakukan secara efektif, ini bisa meningkatkan kepuasan pribadi dan motivasi untuk terus bekerja dengan cara yang sama.
6. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik : Dengan memahami apa yang efektif, kita dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis, serta memilih pendekatan yang memberikan hasil terbaik.
7. Pengelolaan Waktu : Efektivitas membantu kita mengatur waktu dengan lebih baik. Ini penting untuk menghindari penundaan dan memastikan bahwa kita menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal.

8. Keunggulan Kompetitif : Dalam konteks bisnis atau profesional, efektivitas sering kali memberikan keunggulan kompetitif. Organisasi atau individu yang efektif cenderung lebih sukses dan lebih adaptif terhadap perubahan.

Secara keseluruhan, efektivitas membantu kita beroperasi dengan lebih efisien, mencapai hasil yang lebih baik, dan memaksimalkan potensi kita dalam berbagai situasi.

Menurut Miller & Le Breton (2020 : 1404-1426) ada beberapa cara untuk meningkatkan efektivitas, pengambilan keputusan strategis menggunakan analitik data. Berikut adalah cara-cara yang diuraikan dalam artikel tersebut :

1. Pemanfaatan Data *Analytics*

Penggunaan data analytics memungkinkan organisasi untuk menganalisis data besar dan kompleks untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Dengan memanfaatkan teknik analitik canggih, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih berdasarkan bukti dan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan strategis.

2. Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Memastikan bahwa keputusan strategis didasarkan pada analisis data yang solid dapat mengurangi risiko dan meningkatkan efektivitas. Data yang akurat dan relevan mendukung keputusan yang lebih tepat dan meminimalkan ketergantungan pada intuisi atau spekulasi.

3. Pengembangan Kompetensi Analitik

Organisasi perlu mengembangkan keterampilan analitik di kalangan karyawan mereka. Pelatihan dan pengembangan dalam analitik data dapat meningkatkan kemampuan tim dalam menginterpretasikan data dan menerapkan wawasan yang diperoleh untuk keputusan strategis.

Efektivitas juga dipengaruhi oleh berbagai unsur yang saling terkait. Memahami unsur-unsur ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan untuk mencapai tujuan secara optimal. Menurut Miller & Le Breton (2020 : 1404-1426) beberapa unsur utama yang mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan strategis melalui penggunaan analitik data adalah:

1. Kualitas dan Aksesibilitas Data
2. Kemampuan Analitik
3. Penggunaan Teknologi Analitik

4. Integrasi Data ke dalam Proses Pengambilan Keputusan
5. Budaya Organisasi yang Mendukung Data

Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas secara umum :

1. Perencanaan Anggaran : Keakuratan dalam memperkirakan biaya dan pendapatan sangat penting. Perencanaan yang baik mencakup analisis mendalam dan perkiraan yang realistis.
2. Realisasi Anggaran : Mengikuti rencana anggaran yang telah ditetapkan tanpa penyimpangan yang signifikan.
3. Pemantauan dan Evaluasi : Pemantauan harus dilakukan secara rutin dan tepat waktu untuk mendeteksi masalah sedini mungkin.
4. Sumber Daya dan Infrastruktur : Memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan, baik finansial maupun non-finansial, tersedia dan dapat diakses.
5. Koordinasi Internal : Komunikasi yang jelas dan terbuka antar departemen dan unit terkait.
6. Pelatihan dan Kapasitas SDM : Tenaga kerja harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola anggaran.
7. Responsivitas terhadap Masalah : Kemampuan untuk mengenali masalah atau kendala dengan cepat.

Setiap faktor ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan efektif dan efisien. Dengan memperhatikan dan mengelola faktor-faktor ini dengan baik, organisasi dapat memaksimalkan hasil dari anggaran belanja mereka.

2.1.5 Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan oleh sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma dan dengan biaya yang serendah rendahnya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Menurut Mesiono (2018 : 52) Efisiensi merupakan salah satu ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mengelola anggaran. Efisiensi memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas dan produktivitas suatu organisasi. Suatu organisasi dianggap efisien jika dapat mencapai hasil dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Sementara itu, suatu organisasi dianggap efektif jika mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan

tanpa menggunakan lebih banyak sumber daya. Angka yang dihasilkan dari rasio ini tidak bersifat *absolut*, tetapi *relative* yang artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Estimasi tingkat efisiensi organisasi dalam menyerap anggaran dapat dilakukan dengan membagi realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} = 100\%$$

Tabel 2.2
Rasio Efisiensi

Rasio Efisien	Kriteria
>100	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Menurut Narayanan & Fahey (2020 : 485-501) Efisiensi operasional membantu organisasi dalam mengelola dan mengurangi biaya operasional. Dengan mengoptimalkan proses dan meminimalkan pemborosan, organisasi dapat mengurangi biaya yang tidak perlu dan meningkatkan margin keuntungan. Dalam sektor keuangan, di mana margin keuntungan seringkali tipis, pengelolaan biaya yang efektif sangat penting. Efisiensi berkontribusi langsung terhadap kinerja finansial yang lebih baik. Proses yang lebih efisien dapat meningkatkan produktivitas dan hasil finansial, yang sangat penting untuk mempertahankan daya saing dan profitabilitas di sektor keuangan yang sangat kompetitif.

Meningkatkan efisiensi adalah kunci untuk mencapai hasil yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Menurut Halim & Siswanto (2020 : 205-220) berikut adalah cara-cara yang diusulkan untuk meningkatkan efisiensi:

1. Melakukan analisis mendalam terhadap proses bisnis yang ada untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Pemetaan proses bisnis membantu dalam memahami alur kerja dan mengidentifikasi bottlenecks atau titik-titik masalah yang menghambat efisiensi.

2. Mengadopsi teknologi informasi yang tepat dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan administratif, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan kecepatan serta akurasi dalam pemrosesan informasi.
3. Memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada karyawan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka secara efisien. Pelatihan membantu dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan.
4. Melakukan evaluasi rutin terhadap proses bisnis dan hasil kinerja untuk mengidentifikasi area perbaikan dan implementasi tindakan korektif. Proses perbaikan berkelanjutan memastikan bahwa efisiensi terus meningkat seiring dengan perubahan kebutuhan dan teknologi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dapat bervariasi tergantung pada konteks organisasi atau sistem yang dimaksud. Menurut Sukmawati & Yuliana (2020 : 115-126) berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi:

1. Kepemimpinan dan kemampuan manajerial memainkan peran penting dalam menentukan efisiensi. Manajemen yang efektif dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan produktivitas.
2. Ketersediaan dan pengelolaan modal yang memadai sangat mempengaruhi efisiensi.
3. Struktur dan prosedur operasional yang diterapkan berpengaruh langsung terhadap efisiensi. Proses yang terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas.

Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas secara umum :

1. Keakuratan Perencanaan : Kemampuan dalam merencanakan anggaran dengan tepat, memperkirakan biaya dan kebutuhan secara akurat.
2. Penggunaan Dana : Penggunaan dana harus dilakukan sesuai dengan rencana anggaran, menghindari pemborosan dan memastikan bahwa semua alokasi anggaran digunakan secara optimal.
3. Kepatuhan terhadap Anggaran : Tingkat di mana anggaran belanja dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.
4. Optimalisasi Pengeluaran : Mengelola pengeluaran untuk memastikan bahwa setiap biaya yang dikeluarkan memberikan nilai tambah yang maksimal.

5. Pemantauan dan Kontrol : Sistem pemantauan dan kontrol yang memastikan bahwa pengeluaran tetap dalam batas anggaran dan tidak melebihi rencana.
6. Peningkatan Proses : Kemampuan untuk meningkatkan proses anggaran secara berkelanjutan, termasuk pelaksanaan dan evaluasi.
7. Kualitas Data dan Informasi : Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan anggaran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian terdahulu telah dilakukan dalam kaitannya dengan keputusan pembelian. Namun, penelitian tersebut bervariasi dalam hal penggunaan variabel independen, lokasi penelitian, jumlah responden, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa contoh penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keputusan pembelian.

Arfiani (2023) Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh Periode Anggaran 2018-2022. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian untuk tingkat efektivitas pada tahun 2018-2022 keseluruhannya cukup efektif dan tingkat efisiensi dari tahun 2018-2022 keseluruhan cukup efisien. Diharapkan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh agar meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi dengan memperbaiki dan mengevaluasi setiap kekurangan yang terjadi baik dari segi program dan juga anggaran

Hasibuan (2023) Beberapa permasalahan yang diangkat adalah bagian dari tujuan penelitian ini, seberapa besar tingkat efektivitas realisasi biaya anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nagan Raya dan Apakah Realisasi anggaran biaya selalu efektif terrealisasikan. adapun ruang lingkup penelitian ini ialah mengukur tingkat efektivitas per triwulan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nagan Raya tahun anggaran 2022. Didalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas realisasi anggaran biaya BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya dalam per triwulan. Metode analisis deskriptif ialah metode analisis data yang digunakan dipenelitian ini dengan menggunakan rumus mahsun 2009. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas anggaran biaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nagan Raya tahun anggaran 2022, Pada triwulan ke-1 memiliki kriteria yang kurang efektif yaitu hanya mencapai 65,15%, Pada triwulan ke-2 mengalami peningkatan

118,04% dengan kriteria sangat efektif, hasil tersebut lebih dari 100% dikarenakan beberapa sub kegiatan pada triwulan ke-1 di realisasikan pada triwulan ke2 dan untuk triwulan ke-3 yaitu 352,76% dengan kriteria sangat Efektif, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan anggaran target sangat jauh beda, dimana anggaran realisasi lebih besar di realisasikan dari pada anggaran target/rencananya, hal tersebut terjadi dikarenakan pada triwulan ke-1 dan triwulan ke-2 ada program kegiatan yang belum terlaksanakan sehingga di realisasikan pada triwulan ke-3 oleh karena itu hasil tersebut lebih dari 100%.

Ina (2023) Hadirnya perkembangan teknologi pada saat ini mempengaruhi perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya Indonesia yang semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya hal tersebut Bappeda Provinsi Bali dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah menerapkan sistem Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) agar penggunaan anggaran menjadi efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2017-2022 pada Bappeda Provinsi Bali. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan analisis data perhitungan pengukuran efektivitas dan efisiensi. Penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2017-2022. Tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Bappeda Provinsi Bali periode tahun 2017, 2018, 2019, 2021 dengan kriteria cukup efektif dan tahun 2020, 2022 dengan kriteria efektif. Sedangkan tingkat efisiensi tahun 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 dengan kriteria sangat efisien hanya di tahun 2019 dengan kriteria efisien.

Syahira (2023) Anggaran merupakan suatu rencana keuangan untuk jangka waktu di masa depan yang berisi pendapatan dan penggunaan lokal, yang dapat menggambarkan pengaturan otoritas publik untuk memahami dan menetapkan aset. Pengelolaan sumber daya yang baik merupakan komponen penting dalam memahami penggunaan rencana keuangan, untuk itu perencanaan yang dilakukan dan disusun oleh pemerintah daerah harus dipikirkan dengan baik dan tepat, sehingga penambahan tingkat kecakapan dapat diakui benar bentuknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada BPKAD Kota Medan. Metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan pengakuan

Anggaran Belanja Daerah yang kemudian dirangkai, dijelaskan, dan dianalisis yang kemudian dapat diambil kesimpulan. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa realisasi Anggaran Belanja Daerah di BPKAD Kota Medan selama tahun anggaran 2020-2021 telah berkembang dan tergolong efisien dengan jumlah rata-rata persentase efisiensi sebesar 64,56%.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

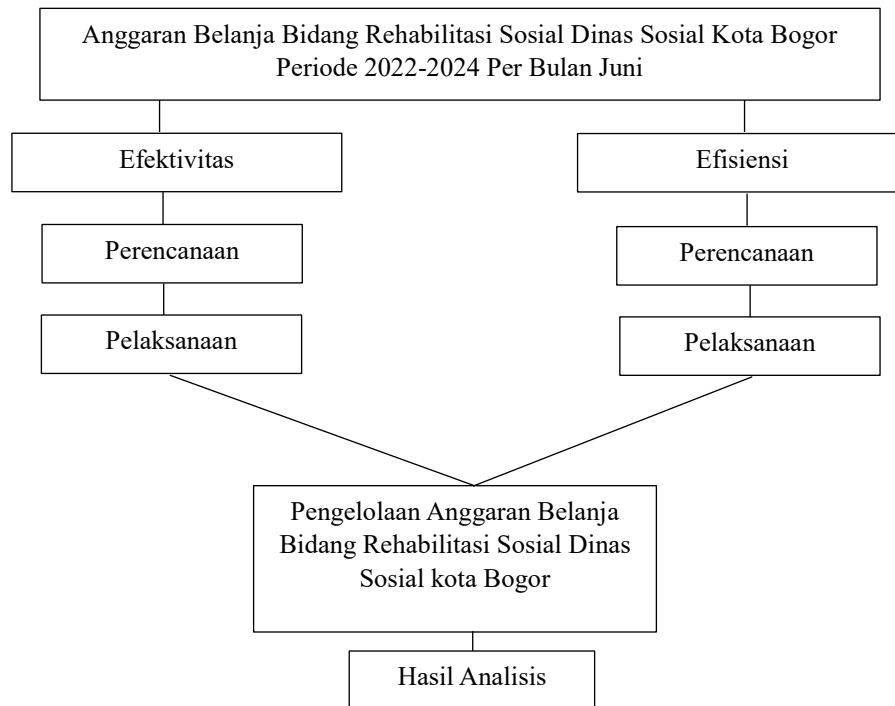
NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Arfiani (2023)	Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh Periode Anggaran 2018-2022.	Efektivitas dan Efisiensi	Deskriptif Kualitatif	Untuk tingkat efektivitas pada tahun 2018-2022 keseluruhannya cukup efektif dan tingkat efisiensi dari tahun 2018-2022 keseluruhan cukup efisien. Diharapkan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh agar meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi dengan memperbaiki dan mengevaluasi setiap kekurangan yang terjadi baik dari segi program dan juga anggaran.
2	Hasibuan (2023)	Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Biaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nagan Raya	Efektivitas	Deskriptif Kualitatif	Kriteria hasil analisis efektivitas pada triwulan ke-1 mendapatkan hasil yang kurang efektif dengan persentase 65,15%, triwulan ke-2 didapat hasil yang sangat efektif dengan persentase 118,04% dan lebih dari 100%, triwulan ke-3 mencapai 352,76% dengan kriteria sangat efektif, berdasarkan hasil perhitungan dari triwulan ke-1 sampai triwulan ke-3, hasil triwulan ke-3 merupakan yang paling tinggi.
3	Ina (2023)	Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2017-2022 Pada Badan Perencanaan Pembangunan	Efektivitas dan Efisiensi	Deskriptif dan kualitatif analisis data perhitungan pengukuran efektivitas dan efisiensi.	Tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Bappeda Provinsi Bali periode tahun 2017, 2018, 2019, 2021 dengan kriteria cukup efektif dan tahun 2020, 2022 dengan kriteria efektif. Sedangkan tingkat efisiensi tahun 2017,

		Daerah Provinsi Bali.			2018, 2020, 2021, 2022 dengan kriteria sangat efisien hanya di tahun 2019 dengan kriteria efisien.
4	Syahira (2023)	Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan	Efisiensi	Penelitian deskriptif	Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa realisasi Anggaran Belanja Daerah di BPKAD Kota Medan selama tahun anggaran 2020-2021 telah berkembang dan dan tergolong efisien dengan jumlah rata-rata persentase efisiensi sebesar 64,56%.
5	Marlena (2022)	Analisis Relisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Kinerja Anggaran Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung	Efektivitas Kinerja	Deskriptif Kuantitatif.	Penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Kinerja Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung periode 2019-2021 dikatakan sangat efektif. Karena data-data yang telah peroleh peneliti sudah diolah dan mendapatkan hasil yang baik pula.

Sumber : Kampus Terkait (2024)

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dan faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting dan merupakan landasan dari seluruh penelitian. Menurut Sugiyono (2020 : 22) kerangka konseptual digunakan untuk menunjukkan gambaran secara umum mengenai objek penelitian yang dilakukan dalam kerangka dari variabel yang ada. Anggaran adalah rencana sistematis dalam bentuk angka yang mencakup semua aktivitas perusahaan untuk periode waktu tertentu di masa depan, itulah sebabnya rencana keuangan seringkali disebut juga sebagai anggaran. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang penting dalam arti bahwa semua kegiatan akan dihitung dalam satuan uang, sehingga pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan dapat diukur.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Sumber : Penulis (2024)

